

**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sagan III/4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 512386 Faks.: (0274) 560380

Website: <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>

Email: dislautkan@jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Ir. BAYU M. H. SASONGKA, M.Si
NIP. 641021991121001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)”:
 - Diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tagkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Pelabuhan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 328.611 juta rupiah; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 345.870,2 juta rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105,23 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 318.428,6 terjadi peningkatan sebesar 108,61%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya status kawasan konservasi”:
 - Diukur dengan indikator Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Tata Ruang.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebanyak 80 persen, sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 terealisasi 80 persen. Dengan demikian

capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100 %.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 30% terjadi peningkatan sebanyak 266 %

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Diperlukan inovasi program dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PDRB subsektor perikanan. Pendapatan nelayan, pembudidaya maupun pengolah perlu ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan penyediaan sarana prasarana produksi.
2. Penyelesaian tahapan kawasan konservasi perlu perhatian lebih karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu target penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2022 harus dipersiapkan mulai dari sekarang agar tercapai. Perlu dipersiapkan juga untuk indikator konservasi karena targetnya sudah 100% di tahun 2022, sehingga perlu ditetapkan lagi terkait pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2022.
3. Permasalahan klasik Pemasaran produk perikanan dan kelautan diatasi melalui marketplace serta pemasaran e-commerce untuk meningkatkan omzet penjualan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.4 Isu-Isu Strategis.....	6
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	7
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	10
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	12
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	28
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	28
3.2 Efisiensi Anggaran	37
3.3 Inovasi	38
BAB 4 Penutup.....	46
LAMP IRAN	47

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2021	9
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3.1	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	14
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	21
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021	23
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2021	28
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.4	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan	30
Tabel III.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	32
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel III.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	35
Tabel III.8	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021	37

Daftar Gambar

Gambar I.1	Cascading Kinerja	2
Gambar I.2	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	3
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	5
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	27
Gambar II.2.	Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	27
Gambar III. 1	Penangkapan dan pengolahan ubur-ubur oleh nelayan dan penduduk disekitar Pelabuhan Perikanan Sadeng ...	33
Gambar III.2	Probiotik untuk Udang Vanamei	39
Gambar III.3	Pelayanan Terpadu di PPP Sadeng	39
Gambar III.4	Pelayanan Seputar Informasi magang di Dislautkan DIY via DM Instagram	40

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

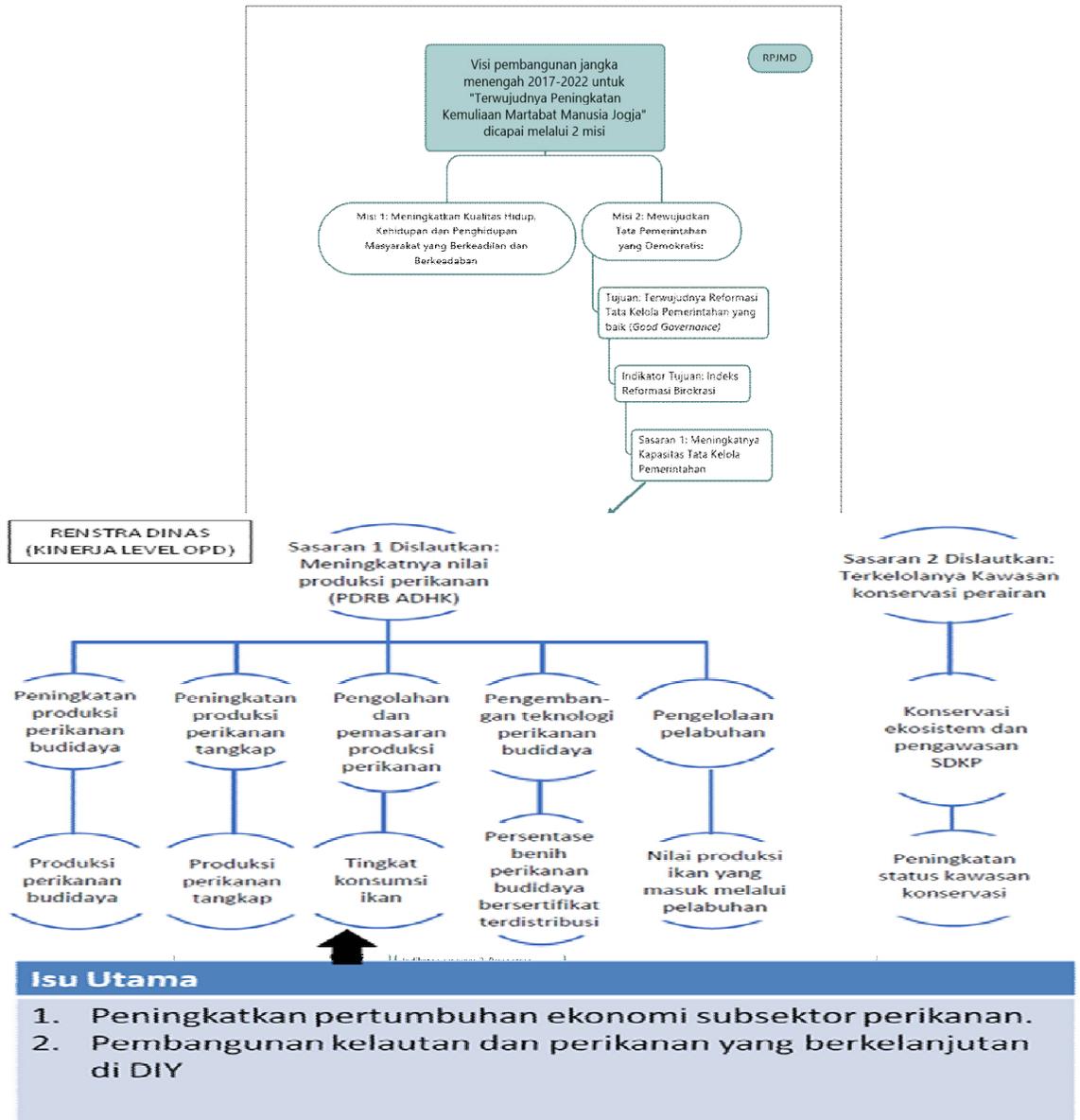
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

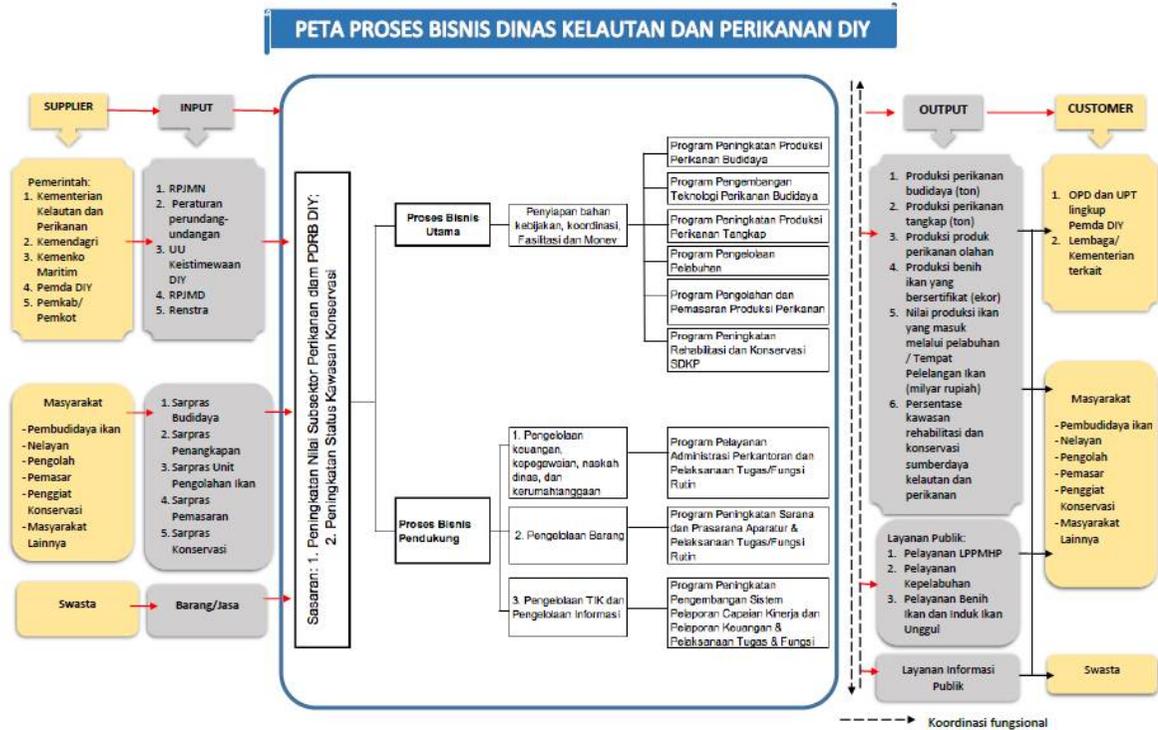
Gambar I.1 *Cascading Kinerja*



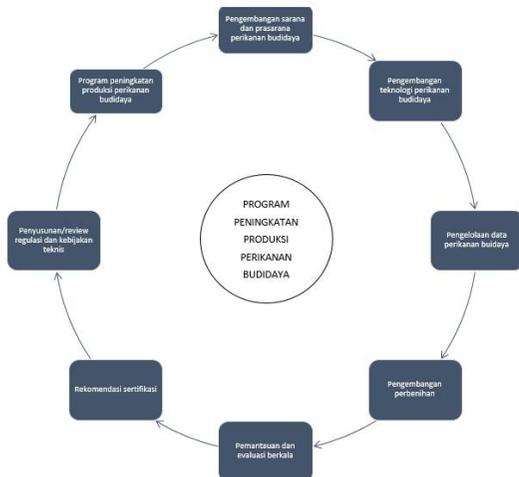
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

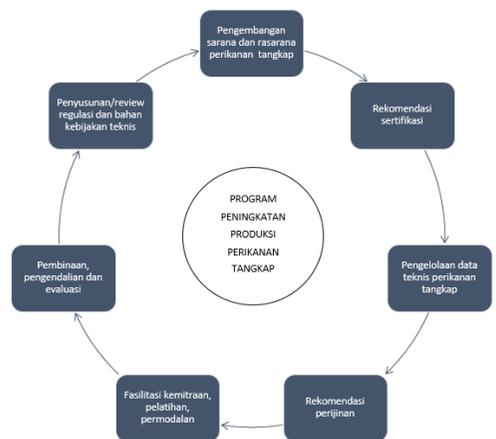
Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



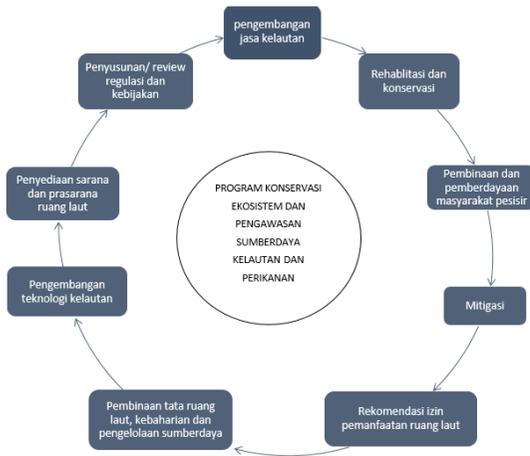
A. PETA PROSES BISNIS PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA



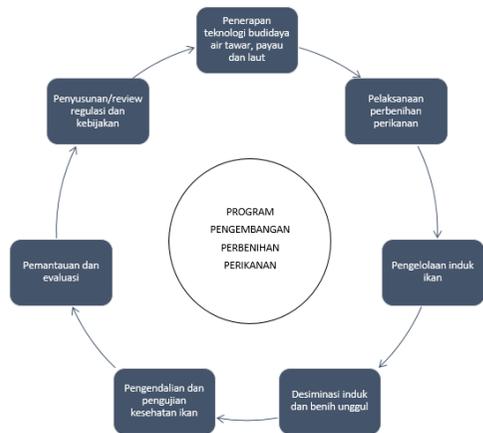
B. PETA PROSES BISNIS PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP



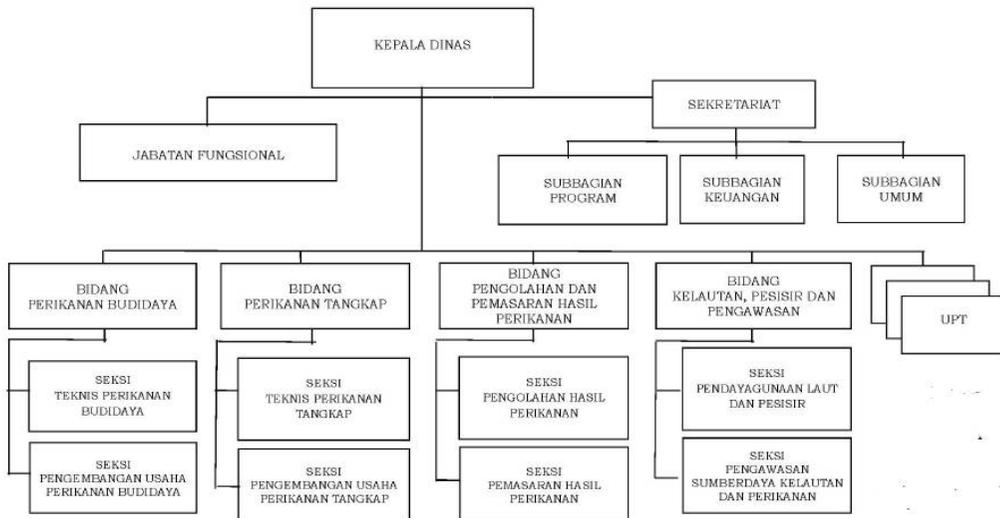
C. PETA PROSES BISNIS PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



E. PETA PROSES BISNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sumber: Perda/s DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 61 tahun 2018 dan SK Dislautkan DIY No 188/0023/2021 tentang Proses Bisnis Pencapaian Sasaran dan Program Dislautkan DIY

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
4. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
7. Pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
8. Perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
10. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
11. Penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
12. Penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kabupaten/Kota dalam DIY;
13. Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
14. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
15. Fasilitasi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
16. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
17. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
18. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
19. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan Perikanan;

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Umum 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Program 3. Kabid Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Budidaya 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 4. Kabid Perikanan Tangkap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Tangkap 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap 5. Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Pendayagunaan Laut dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penata Kearsipan 2) Pengadministrasi Umum 3) Pengelola Barang Milik Negara 2. Dibawah Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifikator Data Laporan Keuangan 2) Pengelola Akuntansi 3) Bendahara 4) Pengelola Gaji 3. Dibawah Kasubbag Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 4. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perikanan Budidaya 3) Calon Pengawas Perikanan Pertama

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Pesisir 2) Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 6. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Kasi Pengolahan Hasil Perikanan 2) Kasi Pemasaran Hasil Perikanan 7. Jabatan Fungsional: 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Benih Ikan 3) Pengawas Perikanan	5. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya: 1) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran 2) Calon Pengawas Perikanan Pertama 6. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Tangkap: 1) Analis Kenelayanan 2) Pengadministrasi Umum 7. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap: 1) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha; 8. Dibawah Kasi Pendayagunaan Laut dan Pesisir: 1) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; 2) Pengadministrasi Umum 9. Dibawah Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1) Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir 10. Dibawah Kasi Pengolahan Hasil Perikanan: 1) Analis Mutu Hasil Perikanan; 11. Dibawah Kasi Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Pengelola Pemasaran;

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta", antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta melalui mekanisme KPBU yang telah diinisiasi oleh Tim Percepatan bersama Bappenas. Dan sudah sampai pada penyusunan DPP (Daftar Prioritas Proyek) oleh PT. PII yang didanai oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk mendapatkan pendanaan OBC (Outline Bussiness Case) dari Bappenas harus menyatukan dulu asetnya (BBWSO, Perhubungan, Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY). SKB Tiga Menteri sudah dikomunikasikan dengan Kemenkomaritim. Ditindaklanjuti dengan survey lokasi Pelabuhan Perikanan

Tanjung Adikarto. Kemenkopolkham juga ikut serta membantu mengkoordinasikan penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto.

2. Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka dibangun Pelabuhan Perikanan Gesing di Gunungkidul dengan dana APBD. Tahun 2020 telah dibuat Masterplan PPI Gesing dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah PPI Gesing. Tahun 2021 telah dibuat Dokumen DED, Amdal dan pembebasan tanah melalui appraisal. Tahun 2022 akan mulai pembangunan PPI Gesing yang terdiri dari pembangunan : Kolam Dermaga, Gedung TPI, Jalan lingkungan, Sarana MCK, Gedung Pengepakan, Mushola, Sarana Air Bersih, Gerbang dan Pagar.
3. Pengembangan Paket Teknologi Budidaya. Telah dirintis pengembangan Pakan Mandiri dengan bahan baku murah. Telah dilakukan kegiatan sarasehan pakan mandiri, untuk substitusi pakan bagi pembudidaya. Kegiatan yang terkait dengan benih ikan berkualitas telah dilakukan di 2021 serta mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BPTPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi						107	29	38	10	30	77	30
	1. Administrator	7		7			7	5	2			5	2
	2. Pengawas	17		17			17	8	9			11	6
	3. Pelaksana	113		100	13		83	16	27	10	30	61	22
C.	Jabatan Fungsional	10		10			7		7			3	4
	Jumlah	148		135	13		115	30	45	10	30	81	34

Sumber: Data Kenerawaian Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Desember 2021

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 45 orang (39,13%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 30 orang (26,08%), D3 10 orang (0,08%), SLTA 30 orang (26,08%). Komposisi pegawai perempuan memang lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; namun untuk jabatan struktural perempuan jumlahnya hampir sama dengan jabatan struktural laki-laki . Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 33 orang, terdiri dari 24 orang pejabat pelaksana substantif dan 9 pejabat pelaksana administratif. Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan tidak ada yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif. Terdapat satu Jabatan Pelaksana substantif yang belum terisi yakni Pengelola Sistem Jaringan serta 6 Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif, yakni Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Persuratan, Teknisi Sarana dan Prasarana dan Pengemudi. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	20 bidang	13.892.166.000
2	Peralatan dan Mesin	2.722 unit	18.671.866.674,18
3	Gedung dan Bangunan	129 unit	72.641.224.887,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197 unit	123.581.995978,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.047 unit	392.770.500
	Jumlah		173.836.483.237,82

Sumber: Data Dislautkan DIY Desember 2021

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, dan 21 (dua puluh satu) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain- lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah

pegawai mendekati 1: 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.608.919.100	Rp1.608.919.100	0
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.603.919.100	Rp1.603.919.100	0
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0
			Jumlah Pendapatan	Rp1.608.919.100	Rp1.608.919.100	Rp0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp42.242.975.109	Rp37.863.681.562	Rp4.379.293.547
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp15.979.131.699	Rp15.213.574.152	Rp 765.557.547
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp23.050.843.410	Rp18.621.482.410	Rp 4.429.361.000
5	1	05	Belanja Hibah	Rp3.213.000.000	Rp4.028.625.000	(Rp 815.625.000)
5	2		BELANJA MODAL	Rp48.836.172.100	Rp28.898.669.000	Rp 19.937.503.100
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp45.000.000.000	Rp25.606.191.000	Rp 19.393.809.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp450.031.000	Rp456.631.000	(Rp 6.600.000)
5	2	03	Belanja Modal Gedung	Rp3.186.151.100	Rp2.635.857.000	Rp 550.294.100

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			dan Bangunan			
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp199.990.000	Rp199.990.000	Rp0
			Jumlah Belanja	Rp91.079.147.209	Rp66.762.350.562	Rp24.316.796.647
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp89.470.228.109)	(Rp65.153.431.462)	(Rp24.316.796.647)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY semula Rp 89.470.228.109,00 mengalami perubahan menjadi Rp65.153.431.462,00 atau berkurang Rp24.316.796.647. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk mencamtumkan inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala,Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya (output dan IKU).</p>	<p>dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dislautkan DIY akan menambahkan inovasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dan telah diisikan juga di Aplikasi Sengguh. 2. Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja setiap bulan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya. 3. Laporan SAKIP tahun 2021 akan memuat tentang penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi baik output maupun IKU di eselon 2 dan eselon 3 dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”

Adapun sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra 11
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n	Juta rupiah	317.809	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	%	N/A	20	30	60	80	100	100

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1. Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 2. Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan	perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk olahan Mengembangkan sistem pemasaran yang modern
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	1. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 2. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi	Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Menggerakkan partisipasi masyarakat

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.816.307.600	3.459.669.500	(356.638.100)
	1.1.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	488.308.500	349.246.500	(139.062.000)
	1.1.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	120.609.500	110.929.500	(9.680.000)
	1.1.1.2. Penyediaan	367.699.000	238.317.000	(129.382.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
	1.1.2 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.232.661.000	1.073.193.000	(159.468.000)
	1.1.2.1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.232.661.000	1.073.193.000	(159.468.000)
	1.1.3 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)
	1.1.3.1 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)
	1.1.4 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)
	1.1.4.1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)
	1.1.5. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.932.871.100	1.924.201.000	(8.670.100)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Provinsi			
	1.1.5.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.762.332.100	1.762.332.000	(100)
	1.1.5.2 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	170.539.000	161.869.000	(8.670.000)
	1.2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.434.402.000	7.495.197.000	(939.205.000)
	1.2.1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8.434.402.000	7.495.197.000	(939.205.000)
	1.2.1.1 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.626.566.000	3.022.450.000	(604.116.000)
	1.2.1.2 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	714.200.000	394.107.000	(320.093.000)
	1.2.1.3 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya	710.000.000	560.000.000	(150.000.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	1.2.1.4 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.383.636.000	3.518.640.000	150.000.000
	1.3 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.759.009.000	2.151.373.000	(607.636.000)
	1.3.1 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	885.268.000	726.670.000	(158.598.000)
	1.3.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	885.268.000	726.670.000	(158.598.000)
	1.3.2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.408.705.000	1.237.345.000	(171.360.000)
	1.3.2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau	666.250.000	504.486.000	(161.764.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
	1.3.2.2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	742.455.000	732.859.000	(9.596.000)
	1.3.3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)
	1.3.3.1 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)
	1.4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)
	1.4.1 Pengembangan Budaya Bahari	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1	66.116.743.600	43.559.113.000	(22.557.630.600)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2 Terkelolanya kawasan konservasi perairan	2.1 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	1.138.205.500	1.218.353.500	80.148.000
	2.1.1 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.138.205.500	1.218.353.500	80.148.000
	2.1.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	243.907.500	242.307.500	(1.600.000)
	2.1.1.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	710.060.000	859.585.000	149.525.000
	2.1.1.3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	184.238.000	116.461.000	(67.777.000)
	2.2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	390.910.000	265.614.000	(125.296.000)
	2.2.1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	0
	2.2.1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	0
	2.2.2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	273.440.500	148.144.500	(125.296.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.2.2.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	246.289.000	125.918.000	(120.371.000)
	2.2.2.2 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.151.500	22.226.500	(4.925.000)
	2.3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	0	198.792.500	198.792.500
	2.3.1 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	198.792.500	198.792.500
	2.3.1.1 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	198.792.500	198.792.500
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	1.529.115.500	1.678.760.000	+149.644.500
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	67.645.859.100	45.237.873.000	(22.407.986.100)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Tahun 2021

Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.434.500	124.084.500	(13.350.000)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.594.500	76.244.500	(10.350.000)
	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.840.000	47.840.000	(3.000.000)
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.264.672.672	11.087.958.794	(176.713.878)
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.172.607.672	10.995.893.794	(176.713.878)
	2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.020.000	70.020.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.045.000	22.045.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.015.007.800	474.971.800	(540.036.000)
	3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.275.800	8.275.800	0
	3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.635.000	43.635.000	3.000.000
	3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.726.000	57.726.000	0
	3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.660.000	9.660.000	0
	3.5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	898.711.000	355.675.000	(543.036.000)
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.358.000	32.958.000	6.600.000
	4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.358.000	24.958.000	6.600.000
	4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana	8.000.000	8.000.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.862.610	887.112.610	(50.750.000)
	5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.387.000	47.387.000	0
	5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.306.610	253.556.610	(50.750.000)
	5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.169.000	586.169.000	0
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.340.000	443.340.000	0
	6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.580.000	42.580.000	0
	6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.866.900	281.699.900	83.833.000
	6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.900.000	64.900.000	0
	6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.340.000	443.340.000	0
	Total Anggaran Pendukung	14.130.022.482	14.130.022.482	(690.416.878)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	328.611	Triwulan I	328.611
					Triwulan II	328.611
					Triwulan III	328.611
					Triwulan IV	328.611 *)
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD/DAK)	Rp. 3.816.307.600,00
2.	Program Pengelolaan Pelabuhan		
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD/DAK)	Rp. 8.698.153.000,00
4.	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya		
5.	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (APBD)	Rp. 1.138.205.500,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp. 390.910.000,00
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 2.759.009.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
		(APBD)	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 23.169.537.109,00
	Jumlah Anggaran		Rp. 39.972.122.209,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari : Rp. 51.107.025.000,00;
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi :
 - Program Dukungan Manajemen : Rp. 1.315.062.000,00
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 223.247.000,00
(Perikanan Tangkap)
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 264.275.000,00
(Perikanan Budidaya)
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 57.750.000,00
(Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)
 - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri : Rp. 243.049.000,00
 - Program Kualitas Lingkungan Hidup : Rp. 105.000.000,00

Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	328.611	Triwulan I	328.611
					Triwulan II	328.611
					Triwulan III	328.611
					Triwulan IV	328.611*)
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD/DAK)	Rp. 3.459.669.500,00
2.	Program Pengelolaan Pelabuhan		
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD/DAK)	Rp. 7.773.944.000,00
4.	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya		
5.	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (APBD)	Rp. 1.218.353.500,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp. 265.614.000,00
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	Rp. 2.151.373.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 21.241.730.562,00
	Jumlah Anggaran		Rp. 36.110.684.562,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

3. Mengelola Dana Keistimewaan sebagai berikut :

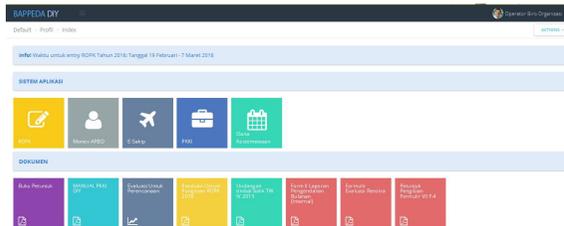
- a. Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
 Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari : Rp. 30.452.873.500,00;
- b. Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
 Urusan Tata Ruang, Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten: Rp. 198.792.500,00
- c. Mengelola anggaran dekonsentrasi :
 - Program Dukungan Manajemen : Rp. 941.920.000,00
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 119.096.000,00
(Perikanan Tangkap)
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 264.275.000,00
(Perikanan Budidaya)
 - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 57.750.000,00
(Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)
 - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri : Rp. 45.000.000,00
 - Program Kualitas Lingkungan Hidup : Rp. 30.015.000,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi

sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

2. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengelola website sebagai berikut

Gambar II.2. Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Sumber: <http://dislautkan.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SAT	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<p><u>Indikator:</u> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)</p> <p><u>Meta Indikator:</u></p>	Juta	317.809	318.428,6	328.661	345.870,2	105,2	Sangat Baik	331.897

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SAT	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS								
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	<u>Indikator:</u> Peningkatan status kawasan Konservasi <u>Meta Indikator:</u> 1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi 20% 2. Pencadangan kawasan konservasi, 30% 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 60% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 80% 5. Penataan Batas Kawasan 100%	persen	N/A	30	80	80	100%	Sangat Baik	100

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya nilai produksi perikanan

Kinerja sasaran terwujudnya meningkatnya nilai produksi perikanan diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK). Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS

Pada tahun 2021 produksi perikanan mencapai 103.524,49 Ton. Dibandingkan tahun lalu produksi ini mengalami kenaikan sebesar 3.132 Ton atau 3,12%. Hal ini berbanding lurus dengan nilai produksi perikanan yang mengalami kenaikan dari 2.387.834.260 rupiah menjadi 2.392.767.669 rupiah, atau naik sebanyak 4.933.409 rupiah.

Tabel III.4 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (per 1.000)
2014	71.960,99	1.335.969.356
2015	74.705,24	1.417.009.418
2016	81.876,80	1.627.339.093
2017	95.365,52	1.895.433.672
2018	102.432,64	2.074.261.142
2019	115.918,29	2.376.324.945
2020	100.392,15	2.387.834.260
2021	103.524,49	2.392.767.669

(Sumber : Dislautkan DIY,2021)

Sektor pertanian secara umum termasuk perikanan tidak terdampak langsung pandemi covid. Pada awal pandemi budidaya perikanan sedikit terdampak karena banyaknya hotel, restoran dan katering yang tutup, tetapi dengan beriringanya waktu mereka melakukan inovasi untuk sistem

penjualannya sehingga produknya dapat terserap langsung oleh konsumen. Perikanan tangkap tidak banyak terdampak karena nelayan tetap bisa melaut dan produksinya meningkat dibanding tahun lalu. Dimasa pandemi ini ikan banyak dicari sehingga harganya tidak turun.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan masih minimnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sehingga perlu terobosan teknologi untuk pengelolaan usaha agar produktivitas output meningkat.

Produk Domestik Regional (PDB/PDRB) beserta indikator turunannya merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan kegiatan perekonomian suatu wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Untuk penghitungan tahun 2021 menggunakan proyeksi dengan metode regresi berdasarkan nilai PDRB Subsektor Perikanan tahun-tahun sebelumnya, karena data resmi dari BPS belum dirilis.

Kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi perikanan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	99,65	328.611	345.870,2	105,2	331.897	104,2 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya nilai produksi perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 328.611 juta rupiah dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 105,2 (sangat baik).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 318.428,6 juta rupiah, terdapat kenaikan sebesar 8,6 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021 ini telah tercapai 104,2 % sehingga diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Faktor Pendukung keberhasilan

Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) mampu mencapai target 100% karena pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat pasca terdampak COVID-19 pada tahun 2021 ini. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Terus dilakukan upaya untuk menekan biaya produksi dalam usaha perikanan budidaya salah satunya dengan substitusi pakan melalui program pakan mandiri serta mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BPTPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Selain itu komunikasi baik dengan pembinaan langsung maupun lewat grup Whatshapp untuk memberi semangat para pelaku usaha kelautan dan perikanan

juga terus dilakukan. Disalurkan DIY juga rutin membantu pemasaran secara online dan ke OPD lain/ kompleks kepatihan untuk produksi perikanan budidaya dan hasil olahan ikan yang telah diinisiasi sejak tahun 2020.

Selain itu dalam rangka menambah pendapatan bagi nelayan pada akhir triwulan IV terdapat banyak ubur-ubur yang muncul di perairan selatan tepatnya disekitar Pelabuhan Perikanan Sadeng Kabupaten Gunungkidul. Peluang ini tentu tidak disia-siakan dengan mengawal dan menghimbau para nelayan di sadeng dan penduduk sekitar untuk menangkap dan mengolah ubur-ubur karena membutuhkan banyak tenaga kerja. Ubur-ubur yang ditelah di tampung kemudian di bersihkan dengan memisahkan antara kaki dan kepala kemudian ditambah garam dan tawas. Dalam kondisi setengah basah, ubur-ubur kemudian dikirim ke cilacap untuk pengolahan selanjutnya.



Gambar III. 1 Penangkapan dan pengolahan ubur-ubur oleh nelayan dan penduduk disekitar Pelabuhan Perikanan Sadeng

3.1.2. Sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan

Tolok ukur capaian sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan diukur dengan indikator peningkatan status kawasan konservasi. Peningkatan status kawasan konservasi terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi (20%)
2. Pencadangan kawasan konservasi (30%)
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%)
4. Penetapan Kawasan Konservasi (80%)
5. Penataan Batas Kawasan (100%)

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi 20% 2. Pencadangan kawasan konservasi, 30% 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 60% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 80% 5. Penataan Batas Kawasan 100%

Kawasan konservasi perairan di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi

Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Kawasan konservasi perairan di DIY berlokasi di Wediombo, Kabupaten Gunungkidul serta di Patehan dan Baros Kabupaten Bantul.

Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi telah selesai dilakukan di tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 tanggal 24 September 2018.

Tahap Pencadangan kawasan konservasi juga telah dilakukan pada tahun 2019. Sesuai surat dari Dirjen Pengelola Rang Laut Nomor 552/DJPRL.5/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 bahwa provinsi yang sudah menetapkan RZWP3K tidak perlu SK Pencadangan Gubernur. Sehingga dengan demikian DIY secara otomatis telah melakukan pencadangan kawasan konservasi melalui RZWP3K.

Kinerja sasaran terkelolanya kawasan konservasi perairan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	50 %	80	80	100%	100	80

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Terkelolanya kawasan konservasi perairan

- a. Tercapai 80%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (mencapai target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 30%, ada peningkatan sebesar 266 % pada tahun ini. Tahapan Penetapan Kawasan Konservasi dapat

dilaksanakan karena kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Faktor Pendukung keberhasilan

Sasaran peningkatan status kawasan konservasi tercapai 80% dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 100 % maka target tahun 2021 tercapai. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 266 %. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan RZWP3K 20% -> cara mengukur : terbitnya Perda RZWP3K
2. Identifikasi dan Inisiasi kawasan konservasi 30% -> cara mengukur : adanya dokumen rekomendasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau2 kecil
3. Pencadangan kawasan konservasi, 60% -> cara mengukur : terbitnya SK Gubernur tentang kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau2 kecil di DIY
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 80% -> cara mengukur : adanya dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi
5. Penetapan Kawasan Konservasi 100% > cara mengukur : adanya SK Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kawasan konservasi di DIY dan pembangunan Tugu Batas.

Pada tahun 2018 sudah ada penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY Tahun 2018-2038 sehingga tahapan peningkatan status kawasan konservasi dapat tercapai 20%. Pada tahun 2019 dilakukan kajian Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tahapan peningkatan status kawasan konservasi dapat tercapai 30%. Pada tahun 2020 dikarenakan sudah adanya perda RZWP3K maka tidak perlu lagi SK pencadangan sehingga status kawasan konservasi dapat dianggap tercapai 60%. Pada tahun 2021 dilakukan kajian rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi di wilayah Bantul sehingga status kawasan konservasi dapat tercapai 80%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh terlaksananya kegiatan tersusunnya Rencana Pengelolaan Zonasi di Kabupaten Bantul, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan pengelolaan serta pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, utamanya dirjen Pengelolaan Ruang Laut dalam penyelesaian SK Penetapan Kawasan konservasi di Kabupaten Bantul yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama di KKP dapat tercapai. Selain itu juga ada dukungan lewat Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang untuk penyelesaian Materi Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan digabungkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Nilai subsektor perikanan PDRB DIY	328.611	328.611	100	11.233.613.500	10.089.815.418	89,82%	-1.143.798.082
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	80	80	100	1.483.967.500	1.381.252.510	93,08%	-102.714.990
Jumlah						12.717.581.000	11.471.067.928	90,20%	-1.246.513.072
Program pendukung						23.393.103.562	22.489.013.164	96,14%	-904.090.398
Total Belanja						36.110.684.562	33.960.081.092	94,04%	-2.150.603.470

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Th 2021, Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Th 2021

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mencapai target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp12.717.581.000, terealisasi Rp11.471.067.928 atau 90,20% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.246.513.072 atau 9,80% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa Rp. 986.115.178
- Efisiensi belanja perjalanan dinas Rp. 227.032.894
- Efisiensi honor narasumber Rp. 33.365.000

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga telah melakukan inovasi pembangunan kelautan dan perikanan di DIY, antara lain adalah:

- ❖ Penyelamatan Plasma Nutfah Ikan Lokal (Wader Pari) dari Kepunahan dengan Domestikasi dan Pengkayaan Ekosistem
 - Bekerja sama dengan Fakultas Biologi UGM
 - Berupaya mengenalkan ikan lokal untuk usaha budidaya
 - Peningkatan populasi ikan waderpari di perairan umum
- ❖ Digitalisasi pelatihan sosialisasi/bimtek untuk pendampingan pelaku usaha perikanan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan aturan Gubernur mengenai Status Tanggap Darurat
 - Pendampingan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui WAG
 - Penggunaan video tutorial yang dibagikan melalui YouTube
 - Interaksi tidak terbatas ruang dan waktu
- ❖ Perakitan Teknologi Udang Vannamee Spesifik Lokal di UKBAL BPTPB DIY
 - Aktifitas unit kerja BAL semakin fokus pada tuisi dan pencapaian target renstra

- Pemahaman SDM tentang tugas, fungsi dan kinerja semakin baik
- Daya hidup udang meningkat sebesar 11,5 % (dengan penggunaan probiotik, provitamin, dan curcuma)
- Produksi uang meningkat 40%



Gambar III.2 Probiotik untuk Udang Vanamei

- ❖ Pengawasan dan Pelayanan Terpadu untuk Pencegahan Illegal Fishing
 - Petugas pelayanan memiliki komitmen yang lebih baik dalam pelayanan
 - Tersedianya SOP pelayanan di PPP Sadeng
 - Pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu ruangan
 - Adanya informasi kepastian penyelesaian pelayanan



Gambar III.3 Pelayanan Terpadu di PPP Sadeng

- ❖ Penataan SDM Aparatur berbasis kompetensi dan bakat
 - Kompetensi SDM berimbang sehingga kinerja menjadi optimal
- ❖ Mentoring integritas kinerja level pengawas (Eselon IV)

- Pengukuran kinerja dipahami sehingga menjadi panduan pencapaian target kinerja
- Mendorong budaya kinerja, terutama berkaitan dengan pemahaman indikator kinerja, pendokumentasian data capaian kinerja dan pengukuran kinerja
- ❖ Menerima pelaporan dari masyarakat melalui website dan media sosial
 - Layanan pengaduan online (website), media sosial dan offline



Gambar III.4 Pelayanan Seputar Informasi magang di Dislautkan DIY via DM Instagram

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas

Kelautan dan Perikanan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebagai berikut:

❖ Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DIY

Garam merupakan prioritas Gubernur untuk dikembangkan di DIY sehingga kita bisa swasembada garam karena kita mempunyai panjang pantai 130,9 KM yang membentang dari Kulonprogo sampai Gunungkidul. Potensi garam cukup besar, tinggal kita mengoptimalkan kelompok yang sudah ada untuk bisa memproduksi garam. Dislautkan DIY bersama Biro Perekonomian dan SDA menyusun Roadmap garam sehingga permasalahan garam dapat diatasi oleh banyak pihak secara lintas sektor antara lain Dislautkan, Disperindag, Nakertrans, Diskop UMKM dan BPOM DIY. Masing2 mempunyai peran sesuai tupoksinya.

Garam di DIY didukung dengan Dana Keistimewaan melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim yang pada Tahun 2021 ini dilokasi Gadingsari Bantul, Bugel Kulonprogo dan Sepanjang Kemadang Gunungkidul. Dana BKK Desa Maritim bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat pesisir. Dana BKK Desa Maritim ini akan bersinergi dengan Desa Mandiri budaya dan Desa Preneur sehingga kolaborasi ini menjadi sinergi yang bagus untuk mencapai sasaran Pemda DIY.

Penyelesaian permasalahan garam telah dikerjakan secara lintas sektor antara lain Dislautkan, Disperindag, Nakertrans, Diskop UMKM dan BPOM DIY. Masing2 mempunyai peran sesuai tupoksinya. yaitu :

- Dislautkan pada TW 2 Tahun 2021 melakukan pelatihan dan FGD garam untuk peningkatan kualitas SDM pelaku garam. selain itu juga telah dianggarkan hibah BKK Desa maritim di Kemadang (sepanjang), Bugel dan Gadingsari, untuk ruang produksi garam.
- Disperindag menyiapkan fasilitasi alat pemrosesan garam dan perijinan SNI Diskop UMKM berperan untuk menguatkan kelembagaan koperasi yang ada

- Disnakertrans membantu terkait ketenagakerjaannya
- BPOM membantu proses perijinan MD dan SNI nya

❖ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

PDRB sub sektor perikanan didukung oleh produksi perikanan budidaya dan tangkap. Untuk meningkatkan produksi tangkap, maka telah disepakati PKS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait dengan Pemanfaatan AIS Camar (Automatic Identification System) utk keselamatan pelayaran dan meningkatkan produktifitas Perikanan Tangkap.

Efektifitas perangkat AIS akan dilaksanakan setelah digunakan oleh nelayan akan dilakukan bersama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Dislautkan pada akhir tahun dan akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

sampai dengan triwulan 4 progress AIS sudah cukup menggembirakan dimana sudah dapat untuk memantau posisi ikan yang ada dilaut sehingga kapal nelayan dapat langsung menuju lokasi ikan berada sehingga dapat menghemat waktu dan biaya BBM. Selain itu kapal yang sudah dipasang AIS juga dapat termonitor dari darat secara online posisi dan rute yang telah dilalui. Apabila semua kapal telah menggunakan perangkat AIS maka dapat memperlancar arus pergerakan kapal, pengawasan jalur dan efektifitas penangkapan dilaut

Tabel

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Pembinaan Usaha Garam Rakyat	Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DIY	BPOM membantu proses perijinan MD dan SNI nya	Produksi Garam Tambak DIY	-Pelaku usaha garam -Masyarakat DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran peningkatan produksi perikanan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha garam 2. Pemenuhan kebutuhan garam di masyarakat
		Disperindag, Diskop UMKM, Disnakertrans	- Disperindag menyiapkan fasilitasi alat pemrosesan garam dan perijinan SNI - Diskop UMKM berperan untuk menguatkan kelembagaan koperasi yang ada - Disnakertrans membantu terkait ketenagakerjaannya			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan tinggi	Masukan Pertimbangan Teknis			
		Masyarakat	Masukan permasalahan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
2.	Pemanfaatan AIS Camar (Automatic Identification System) utk keselamatan pelayaran dan meningkatkan produktifitas Perikanan Tangkap.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	menyiapkan perangkat AIS beserta pelatihannya	Peningkatan produksi perikanan tangkap laut	Nelayan DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Mendukung pencapaian kinerja Sasaran peningkatan produksi perikanan <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperlancar arus pergerakan kapal, pengawasan jalur dan efektifitas penangkapan dilaut
		BROL KKP (Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)	BROL KKP : menyediakan data penginderaan jarak jauh untuk ketersediaan ikannya LAPAN : meyiapkan data cuaca dan iklim			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan tinggi	Masukan Pertimbangan Teknis			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Masukan permasalahan			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY antara lain keterbatasan kualitas dan kuantitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Selain itu juga dengan adanya pandemi covid juga sedikit mempengaruhi usaha kelautan dan perikanan tetapi dapat diatasi dengan inovasi dan adaptasi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Faktor keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan, selain inovasi juga peran *stakeholder* kelautan dan perikanan dalam mendukung secara aktif untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas dan kuantitas pelaku usaha kelautan dan perikanan di DIY melalui program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan sosialisasi peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan. Inovasi dilakukan untuk perikanan budidaya seperti ikan mapan, budidaya *vannamae* kolam bulat, pemasaran *online* dan lain-lain.
2. Koordinasi dan sinergi dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta *stakeholder* kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				Ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	328.611	Triwulan I	328.611
					Triwulan II	328.611
					Triwulan III	328.611
					Triwulan IV	328.611 *)
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD/DAK)	Rp. 3.459.669.500,00
2.	Program Pengelolaan Pelabuhan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD/DAK)	Rp. 7.773.944.000,00
4.	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya		
5.	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (APBD)	Rp. 1.218.353.500,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp. 265.614.000,00
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	Rp. 2.151.373.000,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 21.241.730.562,00
Jumlah Anggaran			Rp. 36.110.684.562

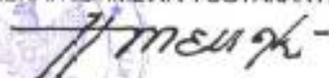
- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
- Mengelola Dana Keistimewaan sebagai berikut :
 - Usuran Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari : Rp. 30.452.873.500,00;
 - Usuran Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten: Rp. 198.792.500,00

c. Mengelola anggaran dekonstruksi :

- Program Dukungan Manajemen	: Rp.	941.920.000,00
- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Perikanan Tangkap)	: Rp.	119.096.000,00
- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Perikanan Budidaya)	: Rp.	264.275.000,00
- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)	: Rp.	57.750.000,00
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	: Rp.	45.000.000,00
- Program Kualitas Lingkungan Hidup	: Rp.	30.015.000,00

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN DIY



DISLATIPAN

Ir. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
NIP. 19541103-199102 1 001

Lampiran 3. Tindak lanjut Evaluasi LKj IP Tahun 2020

R



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15-04 - 2021 .

Nomor : 700/01406 .
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem
AKIP Tahun 2020 pada Dinas
Kelautan dan Perikanan DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 120/III/INSP/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan tujuan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;

3) Implementasi...^α



- 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memperoleh nilai sebesar **87,35** kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
 4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,69 atau 92,30% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,43 atau 89,72% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,94 atau 86,25% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 16,04 atau 80,21% dari bobot sebesar 20%.
 5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
 6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk mencamtumkan inovasi

pada...



pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih baik dari sebelumnya (*output* dan *IKU*).

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15-04-2021



Tembusan:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

2

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

จังหวัดยโสธร

Alamat Jalan Sagan III / 4 Telepon (0274) 512386 Faksimile (0274) 560386
Website : <http://www.dislautkan.jogjaprovo.go.id>, Email :

Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01406 tanggal 15 April 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY</p> <p>Rekomendasi: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk mencamtumkan inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja agar pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala,Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada capaian kinerja lebih balk dari sebelumnya (output dan IKU).</p>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dislautkan akan menambahkan inovasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dan telah diisikan juga di Aplikasi Sengguh.2. Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja setiap bulan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya.3. Laporan SAKIP tahun 2021 akan memuat tentang penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi baik output maupun IKU di eselon 2 dan eselon 3 dengan tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

Lampiran 5. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PDRB sektor perikanan	juta rupiah	318.428,6	328.661	345.870,2	105,2	331.897	104,2
	produksi perikanan budidaya	ton	93.846	89.600	96.401	107,59	89.700	107,47
	produksi perikanan tangkap	ton	6.545	6.862	7.122	103,78	7.063	100,84
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita /tahun	31.24	25,48	31.34	123,00	26.05	120,31
	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	persen	88,00	88,00	88,20	100,23	90	98,00
	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/ tempat pelelangan ikan	Milyar rupiah	58,22	35,25	59,2	167,94	36.73	188,18
2	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	30	80	80	100	100	80,00
	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	persen	43.43	14	30	214,28	14	214,28
	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	persen	10	10	10	10	10	100,00

